

**EVALUASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
BERDASARKAN *COMMUNITY-BASED SERVICE* DI KOTA
MOJOKERTO**

Dana Adila

Program studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
danaadila381@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

Hasan Ismail

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the digital population identity program based on the community-based service approach in Mojokerto City. In today's digital era, the transformation of public services into digital, especially in terms of population administration, is very important. The digital population identity program is expected to facilitate access and management of population data, as well as increase the efficiency of services provided by the government. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, which includes interviews and observations. The results of the study show that the digital population identity program provides significant benefits to the community, through a community-based service approach by directly involving the community as service users. The community feels the benefits such as ease of access anywhere and anytime via smartphones and reducing dependence on the use of physical documents. However, there are still challenges in terms of digital literacy in the community, especially among the elderly and people with limited access to technology. The evaluation was carried out using the CIPP evaluation theory according to Stufflebeam 1985 which consists of four indicators, namely (Context, Input, Process, Product). This research is expected to be a recommendation and further improvement regarding the digital population identity program in Mojokerto City.

Keywords: *Digital Population Identity, Community-Based Service, Program Evaluation*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi program identitas kependudukan digital berdasarkan pendekatan *community-based service* di Kota Mojokerto. Dalam era digital saat ini, transformasi layanan publik menjadi digital khususnya dalam hal administrasi kependudukan menjadi sangat penting. Program identitas kependudukan digital diharapkan dapat mempermudah akses dan manajemen data kependudukan, serta meningkatkan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang meliputi wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan program identitas kependudukan digital memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, melalui pendekatan *community-based service* dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pengguna layanan. Masyarakat merasakan manfaatnya seperti, kemudahan dalam mengakses dimana pun dan kapan pun melalui smartphone serta mengurangi ketergantungan pada penggunaan dokumen fisik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal literasi digital masyarakat, terutama di kalangan lansia dan masyarakat dengan akses teknologi yang terbatas. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi CIPP menurut Stufflebeam 1985 yang terdiri dari empat indikator yaitu (*Context, Input, Process, Product*). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan perbaikan lebih lanjut mengenai program identitas kependudukan digital di Kota Mojokerto.

Kata Kunci: *Identitas Kependudukan Digital, Community-Based Service, Evaluasi Program*

A. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini pelayanan administrasi kependudukan mengalami inovasi yang signifikan. Transformasi layanan publik, terutama dalam hal identitas kependudukan menjadi hal yang penting di era digital. Kemajuan perkembangan layanan digitalisasi administrasi kependudukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Identitas Kependudukan Digital merupakan inovasi pemerintah yang dapat di akses melalui smartphone serta menjadi solusi atas beberapa permasalahan dalam pengelolaan kependudukan seperti kehilangan, kerusakan atau pemalsuan dokumen yang dapat menghambat proses layanan kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menginisiasi inovasi pelayanan kartu tanda penduduk elektronik berbasis digital. Perlahan-lahan, dari yang awalnya berbasis manual, menjadi digital (Fonna, 2019).

Tujuan program identitas kependudukan digital adalah untuk mempercepat akses dan manajemen data kependudukan serta meningkatkan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui aplikasi identitas kependudukan digital terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Identitas kependudukan digital merupakan aplikasi penting karena fitur utama yang dimiliki aplikasi ini terdapat keamanan yang terjaga, dalam hal ini aplikasi identitas kependudukan digital dilengkapi dengan sistem

keamanan yang canggih. Seperti pada saat melakukan aktivasi identitas kependudukan digital, terdapat verifikasi wajah pengguna, hal ini untuk mencegah penyalahgunaan data dan pencurian identitas. Selanjutnya dalam aplikasi identitas kependudukan digital masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan, seperti layanan kesehatan, perbankan dan administrasi lainnya secara lebih praktis tanpa harus membawa kartu tanda penduduk fisik. Identitas kependudukan digital juga dapat mempermudah dan mempercepat proses administrasi pelayanan publik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 Ayat 2 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital merupakan dasar hukum identitas kependudukan digital. Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan program identitas kependudukan digital merupakan langkah penting dalam mendukung “Indonesia Go Digital 2025” (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022).

Identitas kependudukan digital juga diperlukan agar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pusat dan daerah dapat terkoneksi. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada masyarakat dan dapat mengurangi potensi pemalsuan identitas. Selama tiga tahun terakhir indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2022 indeks SPBE berada pada angka 2,34 dengan kategori predikat cukup. Kemudian tahun 2023 naik menjadi 2,79 dengan kategori predikat baik, dan selanjutnya pada tahun 2024 meningkat mencapai 3,12 tetap dengan kategori predikat baik, data tersebut menunjukkan indeks SPBE nasional mengalami peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Peningkatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik (Menpan, 2025). Kota Mojokerto dibandingkan dengan Kota lain memiliki indeks SPBE yang baik pada tahun 2023 mencapai 4,26 dengan kategori predikat memuaskan. Predikat ini menempatkan Kota Mojokerto sebagai peringkat ke 5 di Jawa Timur (Diskominfo Jawa Timur, 2024). Menurut Kementrian Dalam Negeri Tito Karnavian per tanggal 26 Februari Tahun 2024 sudah mencetak 8,2 juta warga negara Indonesia yang menggunakan identitas kependudukan digital, dan diharapkan agar seluruh warga Indonesia memiliki kartu tanda penduduk digital (Antara, 2024).

Kota Mojokerto menerapkan identitas kependudukan digital melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Program identitas kependudukan digital di Kota Mojokerto mulai diterapkan dengan sosialisasi dan aktivasi kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilanjutkan secara bertahap yakni di jajaran birokrasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lalu dilanjutkan ke DPRD, kemudian penerapannya dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan para pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, khususnya Walikota Kota Mojokerto pada Senin 15 Agustus Tahun 2022. Setelah itu mulai menerapkan identitas kependudukan digital pada seluruh masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar pada tahun 2023 (Mojokerto, 2023). Pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital di Kota Mojokerto masih belum sepenuhnya merata, karena masih terdapat banyak

masyarakat yang belum melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Ketakutan masyarakat akan pencurian data membuat keraguan saat akan melakukan aktivasi. Masyarakat yang masih dekat dengan budaya desa sehingga pemahaman masyarakat tentang identitas kependudukan digital masih kurang. Serta belum maksimalnya sosialisasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan identitas kependudukan digital membuat cakupan Kota Mojokerto yang melakukan aktivasi masih jauh dari target nasional. Karena pada Tahun 2023 yang melakukan aktivasi baru 11.000 jiwa dari 31.000 jiwa ditargetkan untuk melakukan aktivasi (Amrulloh, 2024),

Pelaksanaan program identitas kependudukan digital di Kota Mojokerto tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto melalui pendekatan *community-based service*. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan program ini dapat mencapai hasil yang lebih baik. Namun, evaluasi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Evaluasi ini akan mencakup menilai dampak program identitas kependudukan digital terhadap masyarakat, seberapa efektif sistem yang diterapkan, dan masalah yang dihadapi saat menjalankan program. Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki dan mengembangkan identitas kependudukan digital di Kota Mojokerto.

B. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi CIPP menurut Stufflebeam 1985 terdapat empat indikator terdiri dari empat indikator yaitu (*context evaluation* atau evaluasi konteks, *input evaluation* atau evaluasi masukan, *process evaluation* atau evaluasi proses, dan *product evaluation* atau evaluasi hasil).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang secara sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur pilihan dalam bentuk upaya untuk memilih di antara berbagai pilihan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tertentu. Secara konseptual, kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, baik lembaga atau badan pemerintahan, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan memanfaatkan program atau bentuk usaha lainnya.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses untuk mengevaluasi suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan meliputi estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, kinerja, dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan yang fungsional, karena evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir tetapi juga di seluruh proses kebijakan.

Model Evaluasi Kebijakan Publik

Model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam 1985 merupakan evaluasi yang tidak hanya menilai hasil, tetapi juga semua aspek termasuk konteks, masukan,

proses, dan produk (produk yang dihasilkan). Sehingga evaluasi yang dilakukan bersifat kompleks atau menyeluruh. Dalam evaluasi CIPP terdapat empat indikator yang harus dinilai, yaitu konteks, masukan, proses, dan hasil. Pelaksanaan evaluasi harus sistematis, mulai dari observasi objek yang akan di evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis informasi, hingga memberikan simpulan sebagai proses akhir dalam evaluasi. Tujuan dari evaluasi CIPP adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai suatu program, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki program atau membuat keputusan mengenai kelanjutan program.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan berasal dari kata “*empowerment*” yang berarti memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah agar mereka dapat hidup mandiri dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mandiri, bukan hanya dari segi finansial, tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu memperoleh dan menentukan hak politiknya tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

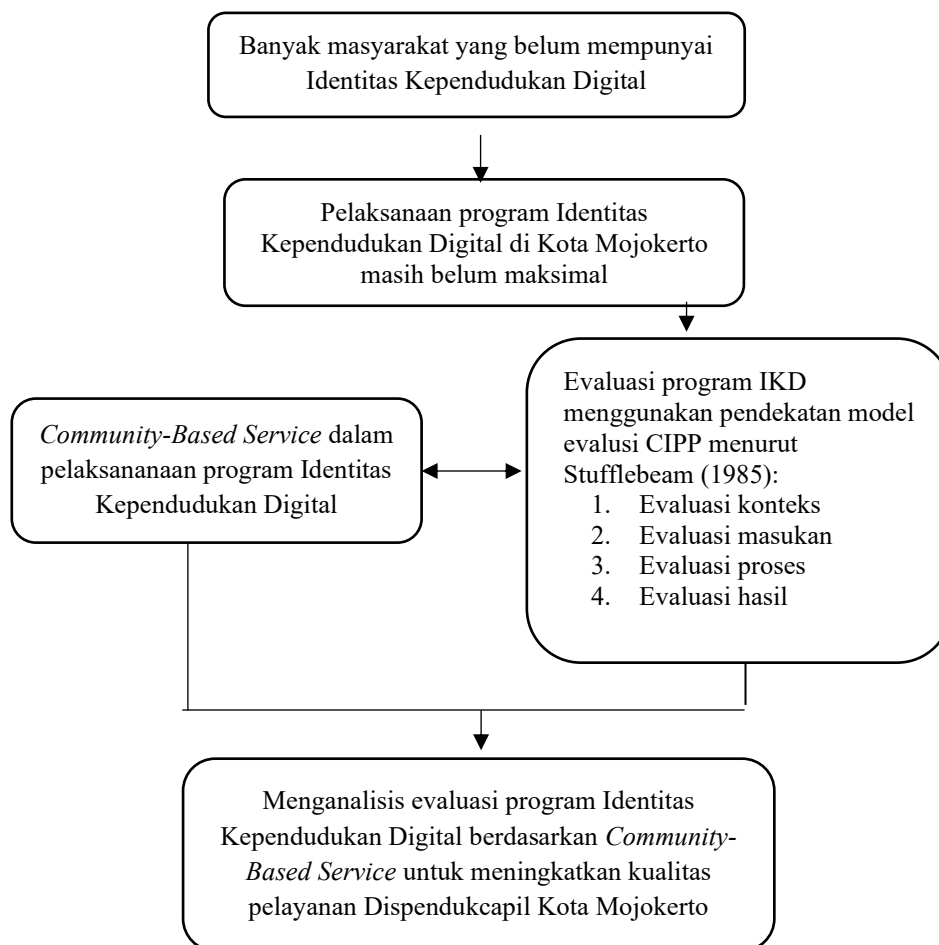
Community-Based Service

Community-based service (CBS) merupakan pendekatan layanan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini, masyarakat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan di sekitar. *Community-based service* mendorong kolaborasi antara penyedia layanan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan relevan.

Identitas Kependudukan Digital

Identitas kependudukan digital merupakan aplikasi yang menyimpan informasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran yang disimpan dalam bentuk digital melalui smartphone. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan, layanan publik, dan mencegah penyalahgunaan data. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti pencegahan tangkapan layar. Proses aktivasi hanya bisa dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kerangka Konseptual



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif Menurut (Murdiyanto, 2020) dalam kutipan Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Objek dan lokasi penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat situasi keadaan dan mendapatkan informasi dari objek yang diteliti serta mendapatkan data yang akurat untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Di Gedung Mall Pelayanan Publik Jl. Gajahmada No.100, Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

2) **Objek Penelitian**

Menganalisis bagaimana evaluasi program identitas kependudukan digital merupakan tujuan dari penelitian ini di Kota Mojokerto. *Community-based service* digunakan dalam penelitian ini dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam sosialisasi dan pelaksanaan program identitas kependudukan digital.

Jenis Data dan Sumber data

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksanannya penelitian dan menjamin keberhasilan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara dengan informan atau sumber langsung. Peneliti melakukan wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan masyarakat Kota Mojokerto.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen atau melalui orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, jurnal, artikel serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang berkaitan dengan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi program identitas kependudukan digital berdasarkan *community-based service* di Kota Mojokerto merupakan upaya pemerintah dalam mendukung pelayanan publik khususnya mengenai layanan kependudukan berbasis teknologi. Program ini bertujuan untuk mempermudah akses dan manajemen data kependudukan yang awalnya manual menjadi digital serta untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan program identitas kependudukan digital di Kota Mojokerto tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto melalui pendekatan *community-based service*. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan program ini dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks merupakan tahap awal dalam mengidentifikasi suatu program atau kebijakan yang dimana evaluasi ini dapat membantu menilai dan mengidentifikasi kebutuhan yang akan dicapai dalam suatu program. Evaluasi konteks dapat dilihat dari pengetahuan mengenai program, relevansi dan manfaat program, serta sejauh mana program ini mempermudah proses administrasi kependudukan, khususnya dalam *community-based service* yang ada di Kota Mojokerto. Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital bagi masyarakat di Kota Mojokerto dilakukan melalui sosialisasi atau jemput bola. Kegiatan dalam rangkaian program Program Identitas Kependudukan Digital seperti sosialisasi atau jemput bola buat masyarakat dirasa relevan karena identitas

kependudukan dapat di akses dimana saja tanpa membawa dokumen fisik. Sejauh mana program ini mempermudah proses administrasi kependudukan, khususnya dalam *community-based service* yang ada di Kota Mojokerto, Program ini mempermudah masyarakat karena dapat mengurangi antrean pada saat mengurus dokumen kependudukan di kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan menggunakan pendekatan *community-based service* melibatkan masyarakat secara langsung pada saat sosialisasi seperti kader ibu-ibu PKK, kader kesehatan, perangkat kelurahan program identitas kependudukan digital akan dapat di akses secara merata oleh masyarakat Kota Mojokerto.



Evaluasi Masukan

Evaluasi masukan merupakan proses membantu mengambil keputusan dan menentukan strategi agar tujuan program dapat tercapai, Evaluasi konteks dapat dilihat dari sumber daya manusia, infrastruktur jaringan internet, dan pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memainkan peran penting dalam kelancaran operasional sistem informasi administrasi kependudukan. Internet di Kota Mojokerto juga menjadi faktor krusial dalam mendukung sistem informasi ini. Dengan infrastruktur internet yang semakin berkembang, aksesibilitas data menjadi lebih mudah dan cepat. Kota Mojokerto telah berupaya meningkatkan jaringan internet, baik melalui penyedia layanan lokal maupun program pemerintah untuk memperluas jangkauan internet di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Jangkauan program dan pelaksanaan program sudah cukup menjangkau masyarakat melalui sosialisasi di sekolah-sekolah atau kelurahan, namun masih terdapat masyarakat yang memiliki akses teknologi yang terbatas, dimana masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki handphone.



Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan bagaimana proses pelaksanaan program dilakukan. Dalam evaluasi ini dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan program, kualitas pelayanan program, keterlibatan masyarakat (*community-based service*), serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program. Prosedur pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital dirancang dengan baik, sehingga mudah dipahami masyarakat khususnya Kota Mojokerto. Kejelasan tata cara aktivasi program ditunjang dengan pedoman teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif. Kualitas pelayanan program Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto masyarakat terbantu dan terlayani terutama ketika menghadapi kendala teknis pada saat proses aktivasi. Masyarakat mengapresiasi kecepatan dan efisiensi dalam proses pengajuan identitas kependudukan digital. Keterlibatan masyarakat (*community-based service*) program identitas kependudukan digital, masyarakat aktif dalam melibatkan kelompok -kelompok masyarakat seperti kader ibu-ibu PKK, karang taruna, perangkat kelurahan yang akan berperan besar dalam menjangkau program identitas kependudukan digital dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto.

No	Uraian Pelaksanaan	Tahapan		Mata Rantai			Keterangan
		Prosedur (SOP)	Alat/Bahan/Perangkat	Penanggungjawab	Waktu	Output	
1	1.1. Menentukan kebutuhan layanan kependudukan digital pada P4D (Pelayanan Prima) dan P4K (Pelayanan Prima) di tingkat kelurahan.	ada					
2	2.1. Melakukan sosialisasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
3	3.1. Melakukan pendaftaran kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
4	4.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
5	5.1. Melakukan pengajuan kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
6	6.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
7	7.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
8	8.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
9	9.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
10	10.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
11	11.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
12	12.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
13	13.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
14	14.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
15	15.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
16	16.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
17	17.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
18	18.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
19	19.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
20	20.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
21	21.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
22	22.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
23	23.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
24	24.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
25	25.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
26	26.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
27	27.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
28	28.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
29	29.1. Melakukan verifikasi kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						
30	30.1. Melakukan pencaharian kependudukan digital kepada masyarakat di tingkat kelurahan.						

Sistem dengan prosedur yang tertera, akan di test dan diimplementasikan secara langsung pada saat diaktifkan oleh Dinas Terpadu Data dan Statistik (DITDAS) sehingga akan dapat diakses oleh masyarakat.

Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil merupakan hasil dari program yang artinya pencapaian akhir dari program yang dijalankan. Dalam evaluasi hasil dapat dilihat dari dampak dan manfaat program identitas kependudukan digital terhadap kemudahan layanan administrasi kependudukan, serta Tingkat Keberhasilan Program. Program Identitas Kependudukan Digital memberikan kemudahan yang signifikan dalam layanan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat yang kehilangan KTP/KK fisik. Bagi pelajar dan mahasiswa program ini mempermudah meningkatkan kenyamanan dan efisiensi karena aplikasi identitas kependudukan digital dapat di akses melalui smartphone. Namun tantangan mengenai program ini masih ada pada kalangan lansia. Di sisi lain bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil program ini mempermudah pengelolaan data kependudukan dan mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan secara keseluruhan. Tingkat keberhasilan program identitas kependudukan digital menunjukkan hasil yang cukup positif, masyarakat banyak yang telah berhasil mengakses dan memanfaatkan layanan identitas kependudukan digital. Namun di sisi lain, masih terdapat tantangan bagi masyarakat lansia dan masyarakat dengan akses teknologi yang terbatas.



E. PENUTUP

Kesimpulan

Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital Berdasarkan *Community-Based Service* di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa program tersebut berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dibuktikan menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (1985) yang terdiri dari empat indikator yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi hasil serta menggunakan pendekatan *community-based service* dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital. Berdasarkan data dan temuan di lapangan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi konteks dapat dilihat dari pengetahuan mengenai program, relevansi dan manfaat program, serta sejauh mana program ini mempermudah proses administrasi kependudukan, khususnya dalam *community-based service* yang ada di Kota Mojokerto menunjukkan hasil yang baik. Relevansi dan manfaat program, sudah menunjukkan relevan dan memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Program identitas kependudukan digital mempermudah akses tanpa perlu menggunakan dokumen fisik. Pendekatan *community-based service* mempermudah masyarakat karena dapat mengurangi antrean pada saat mengurus dokumen kependudukan di kantor pelayanan, dengan melibatkan masyarakat secara langsung kader ibu-ibu PKK, kader kesehatan, perangkat kelurahan program ini dapat di akses secara merata oleh masyarakat Kota Mojokerto. Namun, kendala yang dihadapi rendahnya literasi digital masyarakat terutama pada kalangan lansia, akses teknologi digital yang terbatas dimana masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki handphone.
2. Evaluasi masukan dapat dilihat dari sumber daya manusia, infrastruktur, dan pelaksanaan program. Sumber daya manusia dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mencukupi kebutuhan program, serta cukup sigap dalam membantu masyarakat saat proses aktivasi identitas kependudukan digital. Infrastruktur cukup memadai dengan jaringan internet dan wifi yang ada di setiap RT/RW dan di mal pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Jangkauan program dan perencanaan sudah cukup menjangkau masyarakat melalui sosialisasi di sekolah-sekolah atau kelurahan, namun masih terdapat

masyarakat yang memiliki akses teknologi yang terbatas, dimana masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki handphone. Di sisi lain, kendala yang dihadapi adalah program identitas kependudukan digital masih memerlukan pembaruan secara manual agar tidak terjadi buffering dan masih terdapat masyarakat yang memiliki perangkat yang kurang mendukung.

3. Evaluasi proses dalam evaluasi ini dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan program, kualitas pelayanan, keterlibatan masyarakat (community-based service), serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program. Dari segi prosedur pelaksanaan program mudah dipahami dan tidak memakan waktu yang lama pada saat proses aktivasi identitas kependudukan digital. Kualitas pelayanan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sangat membantu, terutama ketika mengahadi kendala teknis pada saat proses aktivasi. Keterlibatan masyarakat (community-based service) program identitas kependudukan digital aktif dalam melibatkan kelompok masyarakat seperti kader ibu PKK, karang taruna, perangkat kelurahan yang akan berperan besar dalam menjangkau identitas kependudukan digital pada seluruh lapisan masyarakat. Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program masih banyak masyarakat yang kurang paham akan kemajuan teknologi dan kurangnya literasi digital pada masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan perangkat.
4. Evaluasi hasil dalam evaluasi ini dapat dilihat dari dampak dan manfaat program identitas kependudukan digital terhadap kemudahan layanan administrasi kependudukan, serta tingkat keberhasilan program. dampak program menunjukkan masyarakat merasakan program ini memberikan kemudahan saat proses pengurusan administrasi kependudukan, terutama ketika kehilangan KTP/KK fisik. Program ini juga dirasakan manfaatnya dari berbagai kalangan bagi masyarakat muda khususnya pelajar dan mahasiswa sangat membantu adanya program ini, identitas diri dapat di akses melalui smartphone, pada kalangan lansia masih sulit untuk bisa memahami adanya program ini. Serta bagi petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil program identitas kependudukan digital membantu mempermudah pengolahan data kependudukan dan meminimalisir resiko kehilangan dokumen fisik. Tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari cakupan aktivasi identitas kependudukan digital, dimana pada tanggal 22 Mei Tahun 2025 masyarakat yang sudah melakukan aktivasi 15.731 ribu jiwa, atau sekitar 14,27 persen dari capaian target, hal ini menunjukkan antusias masyarakat dalam melakukan aktivasi cukup tinggi, meskipun perlu ditingkan lagi. Kendala yang dihadapi adalah kurang maksimal nya sosialisasi, pemahaman yang kurang di kalangan lansia, dan masih terdapat masyarakat yang belum melakukan aktivasi karena perangkat yang kurang mendukung.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi Program Identitas Kependudukan Digital di setiap kelurahan di Kota Mojokerto dengan melibatkan masyarakat, seperti ibu PKK, kader kelurahan, dan tokoh masyarakat, terutama untuk menjangkau kalangan lansia.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program Identitas Kependudukan Digital, serta mendorong masyarakat melakukan aktivasi melalui perangkat masing-masing. Pembaruan sistem secara manual juga perlu diperhatikan untuk menghindari masalah buffering yang dapat mengganggu proses aktivasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan pelatihan rutin bagi petugas agar mereka lebih siap menghadapi kendala teknis.
4. Memperluas jaringan kerjasama dengan kelompok masyarakat seperti kader PKK dan karang taruna dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi dan program ini. Sosialisasi yang lebih intensif dan terarah juga diperlukan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang paham tentang kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, R. (2024). *31 Ribu Warga Kota Ditarget Aktivasi IKD*. Radarmojokerto.Jawapos.Com. <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/824934478/31-ribu-warga-kota-ditarget-aktivasi-ikd>
- Antara. (2024). *Tito Karnavian minta Dukcapil percepat Identitas Kependudukan Digital*. Antara Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/3986271/tito-karnavian-minta-dukcapi-percepat-identitas-kependudukan-digital>
- Diskominfo Jawa Timur. (2024). *Palapa Mojo Antar Kota Mojokerto Raih Digital Government Award 2024*. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/palapa-mojo-antar-kota-mojokerto-raih-digital-goverment-award-2024>
- Fonna. (2019). Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang. Guepedia. *Fonna*.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Kementerian Dalam Negeri RI*, 1–32.
- Menpan. (2025). *Indeks SPBE Nasional Meningkat, Menteri Rini: Penguatan Integrasi Pelayanan Publik Berbasis Digital*. PANRB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital>
- Mojokerto. (2023). *Disdukcapil Kota Mojokerto Jemput Bola Penerapan Identitas Kependudukan Digital di 3 Tempat*. Dispenduk.Mojokertokota.Go.Id. <https://dispenduk.mojokertokota.go.id/home/berita/Disdukcapil-Kota->

Mojokerto-Jemput-Bola-Penerapan-Identitas-Kependudukan-Digital-
di-3-Tempat

Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian
Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
[http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITI
AN_KUALITATIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF.docx)